

Kemenkeu Belum Rilis APBN 2025, Rocky Gerung: Ada Data yang Disembunyikan?

Category: Politik

written by Redaksi | 11/03/2025



ORINEWS.id – Meski tahun 2025 telah memasuki bulan ketiga atau Maret, namun Kementerian Keuangan belum juga merilis penggunaan APBN. Padahal biasanya setiap bulan Kemenkeu selalu merilisnya. Hal ini memancing pertanyaan publik, apa alasan penundaan laporan Kemenkeu.

“Ini seperti keluarga melaporkan soal dapurnya masih berasap atau tidak. Tapi ketika hal rutin itu tertunda orang pun bertanya-tanya,” ujar [Pengamat Politik](#) Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, dikutip Selasa, 11 Maret 2025.

“Mengapa itu ditunda, itu yang jadi pertanyaan yang kadangkala menyulut pertanyaan berikutnya. Apakah pemerintah menyembunyikan data? Apakah memang ekonomi kita panas sehingga kalau dipamerkan data itu, reaksi pasar internasional juga akan menyebabkan negatif impression pada pemerintah makin buruk? Karena itu adalah hak publik untuk mengetahui bagaimana keadaan dapur negara,” paparnya.

Rocky melanjutkan, kalau melihat data Indef yang sudah

dipublikasikan memang terlihat bahwa proyeksi ekonomi Indonesia sulit mencapai 8 persen seperti yang ditargetkan Presiden [Prabowo Subianto](#) hingga 2029. Di mana data tersebut memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen dalam dua tahun ke depan.

“Artinya itu stagnan juga karena jauh di bawah yang diinginkan yaitu 8 persen. Orang memang bilang itu di atas rata-rata dunia, Jepang bahkan tumbuh hanya 1 persen, sehingga ekonomi Indonesia dianggap baik-baik saja. Tapi angka pertumbuhan (ekonomi) bukan angka yang jadi ukuran stabilitas [Politik](#),” jelas mantan Dosen Filsafat di Universitas Indonesia ini.

Menurut Rocky, yang jadi ukuran stabilitas politik adalah angka disparitas di dalam angka pertumbuhan ekonomi. Kalau angka pertumbuhan tinggi tapi yang menikmati hanya kelas elite ke atas, itu petunjuk pertama bahwa ada pertumbuhan tapi dengan disparitas yang tinggi.

Itu cara kita membaca stabilitas politik, kata Rocky.

“Apalagi kalau sektor yang sebetulnya menjadi penopang buffer dari ekonomi, yaitu konsumsi, dan itu dilekatkan dengan kelas menengah. Di dalam data mutakhir tentang Indonesia justru kelas menengahnya turun kelas, maka itu artinya ada semacam harga diri yang jatuh dari kelas menengah ini,” tuturnya.

“Kalau kelas bawah kan masih ada BLT segala macam, kelas atas pasti gross-nya itu mengikuti prinsip akumulasi. Tapi kelas menengah ini yang harus dihitung sebagai faktor yang rentan untuk menghasilkan sebut saja kerusuhan politik atau gempa bumi politik,” tegas Rocky.[source:rmol]